

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem demokrasi elektoral di Indonesia, pemilihan kepala daerah merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal, yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi langsung dalam menentukan pemimpin daerah mereka. Pilkada tidak hanya sekadar prosedur formal elektoral saja, tetapi juga menjadi arena penting yang menentukan arah pembangunan daerah. Mulai dari aspek ekonomi, sosial, hingga budaya. Melalui pilkada, idealnya setiap warga negara, memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk dipilih maupun memilih tanpa memandang latar belakang identitas. Namun, dalam praktiknya, pilkada seringkali menjadi arena pertarungan identitas, faktor-faktor seperti gender, etnis, dan agama memainkan peran signifikan dalam memengaruhi persepsi publik, preferensi pemilih, serta strategi yang digunakan oleh kandidat (Pratama & Hasanah, 2020).

Di Indonesia, kelompok minoritas dari aspek gender, etnis, dan agama seringkali menghadapi hambatan serius untuk menembus panggung politik terlebih di daerah-daerah yang homogen secara demografis maupun budaya. Di satu sisi, mereka harus berhadapan dengan kompetisi politik yang keras dan penuh pragmatis. Di sisi lain, mereka juga harus menghadapi tantangan diskriminasi kultural, stereotip negatif, serta resistensi dari sebagian kelompok masyarakat yang masih memandang identitas minoritas sebagai kelemahan politik. Tidak jarang kampanye politik juga memanfaatkan isu identitas untuk menarik dukungan

pemilih, yang berdampak pada semakin menguatnya politik identitas dan menghambat demokrasi yang inklusif di tingkat lokal (Savitri & Santoso, 2021).

Berkaitan dengan aspek minoritas gender dalam pilkada, perempuan masih menjadi kelompok yang kurang terwakili dalam struktur kepemimpinan politik di tingkat nasional maupun daerah. Data dari Kementerian Dalam Negeri, hingga tahun 2020 hanya sekitar 10% kepala daerah di Indonesia yang berjenis kelamin perempuan (Medistiara, 2020). Meskipun secara formal telah ada upaya afirmasi melalui kebijakan kuota 30% untuk perempuan dalam daftar calon legislatif. Namun kenyataannya politik di Indonesia masih didominasi oleh laki-laki, terutama di posisi strategis seperti kepala daerah dan jabatan strategis lainnya.

Perempuan calon kepala daerah seringkali dihadapkan pada stigma tidak kompeten, beban ganda, serta resistensi budaya yang menganggap kepemimpinan sebagai ranah maskulin. Persepsi negatif tersebut membuat kemampuan perempuan kerap diragukan, mereka dianggap terlalu emosional, kurang tegas, dan akhirnya menjadi sasaran perlakuan diskriminatif di ranah politik, dunia kerja, hingga jabatan manajerial. Banyak perempuan yang memegang posisi kepemimpinan harus berhadapan dengan sikap skeptis dan berbagai batasan budaya yang menghambat ruang gerak serta pengembangan diri mereka. Stigma ini juga terkait dengan adanya tuntutan ganda antara peran domestik dan profesional, disertai diskriminasi yang berlandaskan penampilan fisik maupun stereotip negatif lainnya (Safitri, 2024).

Dalam sistem sosial dan politik yang masih kental dengan budaya patriarki seperti di Indonesia, penolakan terhadap kepemimpinan perempuan tidak hanya

muncul secara eksplisit saja, melainkan juga melalui bentuk-bentuk resistensi yang lebih halus dengan memanfaatkan mekanisme budaya. Mekanisme ini sering berwujud dalam stereotip gender, norma sosial, serta nilai budaya yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang dianggap “tidak pantas” berada di ruang publik, khususnya dalam ranah politik dan kepemimpinan (Suryakusuma, 2011). Dengan kata lain, perempuan kerap menghadapi hambatan struktural yang kompleks, meliputi keterbatasan akses terhadap sumber daya politik, seperti dukungan partai dan jaringan kekuasaan, serta adanya stigmatisasi sosial yang melekatkan citra negatif terhadap kemampuan mereka dalam memimpin. Selain itu, bias kultural juga semakin memperkuat keraguan masyarakat terhadap kompetensi perempuan, di mana kepemimpinan masih dipersepsikan sebagai ranah laki-laki (Dwijowijoto, 2008).

Yang terakhir berbicara mengenai aspek etnis dalam pilkada di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki berbagai macam etnis dan budaya. Dengan banyaknya etnis dan budaya memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu dampak negatif adanya multi etnis adalah seringkali menghadirkan tantangan bagi kelompok-kelompok etnis minoritas untuk menembus dominasi politik lokal yang kerap dikuasai oleh etnis mayoritas. Kandidat yang berasal dari etnis minoritas, terutama kelompok minoritas seperti Dayak, Madura, Tionghoa dan kelompok minoritas lainnya seringkali menghadapi hambatan sosial berupa prasangka, diskriminasi, atau penolakan simbolik. Politik elektoral pun tidak jarang dimanfaatkan oleh elite untuk memobilisasi sentimen etnis guna memperkuat loyalitas massa, yang berdampak

pada terbatasnya ruang elektoral bagi calon dari etnis minoritas. Mobilisasi ini dapat melibatkan berbagai taktik, seperti dukungan dari organisasi etnis, meskipun dampak taktik ini terhadap hasil pemilu dapat bervariasi.

Kemudian dari sisi agama. Dalam konteks Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia, hubungan antara agama dan politik merupakan fenomena yang kompleks dan sering kali menentukan arah dinamika elektoral. Agama di satu sisi hadir sebagai identitas personal dan komunal yang melekat erat dalam kehidupan masyarakat. Namun, dalam praktik politik, agama sering kali diangkat menjadi instrumen strategis untuk menarik simpati pemilih. Kandidat yang maju dalam Pilkada kerap memanfaatkan simbol-simbol keagamaan, menggandeng tokoh agama, bahkan menyusun program kampanye yang bernuansa religius untuk memperkuat basis dukungan, terutama di daerah dengan tingkat homogenitas agama yang tinggi (Riyanto et al., 2024). Fenomena ini tidak jarang melahirkan politik identitas berbasis agama, di mana afiliasi agama menjadi faktor dominan dalam menentukan pilihan politik, terkadang bahkan mengalahkan pertimbangan rasional seperti rekam jejak, kompetensi, atau visi-misi calon. Sebagai contoh, pada Pemilihan wali kota Medan tahun 2010, seorang kandidat Muslim menang dengan margin besar setelah kampanye yang menekankan solidaritas agama di antara para pemilih Muslim (Aspinall et al., 2011).

Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim kerap kali menyaksikan bagaimana isu agama menjadi komoditas politik yang sensitif. Kandidat dari minoritas agama, seperti Kristen, Katolik, Hindu, atau Buddha, sering kali harus berhadapan dengan sentimen mayoritarianisme yang mempengaruhi

preferensi pemilih. Tidak jarang, identitas keagamaan menjadi alat mobilisasi dukungan maupun serangan politik. Penelitian yang dilakukan Aidah et al., (2023) mencatat bahwa di sejumlah daerah, minoritas agama menghadapi tantangan berupa marginalisasi politik, stigmatisasi, hingga praktik eksklusi simbolik dalam kampanye. Kandidat dari latar belakang minoritas agama juga memiliki peluang yang lebih kecil untuk menang di daerah yang homogen secara agama, karena harus menghadapi resistensi politik identitas berbasis agama mayoritas. Dalam kasus-kasus tertentu menunjukkan bahwa minoritas agama dapat menang apabila mampu membangun koalisi lintas identitas dan menawarkan agenda yang inklusif serta diterima secara luas oleh pemilih.

Pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia pertama kali diterapkan pada tahun 2005. Pilkada menandai era baru dalam pelaksanaan demokrasi lokal yang memberikan ruang partisipatif lebih besar bagi masyarakat dalam menentukan pemimpin daerahnya. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015, terdapat sebanyak 1.646 calon yang bersaing dalam Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dari jumlah tersebut, hanya 124 orang atau sekitar 7,5% merupakan perempuan. Jumlah ini sudah menunjukkan rendahnya keterlibatan perempuan dalam politik elektoral lokal. Lebih memprihatinkan lagi, pada pilkada tahun 2017, jumlah calon perempuan justru mengalami penurunan yang signifikan. Dari total 614 calon yang bertarung dalam pilkada serentak pada tahun tersebut, hanya 44 orang yang

merupakan perempuan, yang berarti hanya sekitar 7,1% dari keseluruhan calon (KemenPPPA, 2018).

Fenomena rendahnya keterwakilan perempuan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah menggambarkan bahwa berbagai hambatan yang bersifat struktural, kultural, dan politis masih sangat kuat membelenggu partisipasi perempuan dalam ranah politik elektoral di Indonesia. Hambatan struktural seringkali berkaitan dengan sistem rekrutmen politik yang tidak inklusif, partai politik sebagai gerbang utama pencalonan cenderung memberikan ruang yang lebih luas bagi kandidat laki-laki. Bias gender masih mewarnai proses pencalonan, di mana perempuan kerap kali dianggap kurang memiliki kapasitas atau daya saing elektoral yang memadai dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu, hambatan kultural juga berperan besar dalam menurunkan peluang perempuan untuk berkiprah di dunia politik. Budaya patriarki yang telah mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia memengaruhi cara pandang publik terhadap peran perempuan, yang masih dianggap lebih sesuai untuk mengurus urusan domestik ketimbang menjadi pemimpin publik. Oleh karena itu, meskipun sistem pilkada langsung telah berjalan hampir dua dekade, persoalan representasi perempuan masih menjadi tantangan serius dalam demokrasi lokal di Indonesia.

Pada era sekarang, khususnya pada pelaksanaan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024, terlihat adanya perkembangan yang cukup signifikan terkait keterlibatan perempuan dalam arena politik elektoral di tingkat lokal. Data menunjukkan bahwa dari keseluruhan 1.551 kandidat yang maju sebagai calon kepala daerah, terdapat 309 perempuan yang turut ambil bagian dalam kontestasi

tersebut (Yuniarto, 2024). Kemudian berdasarkan rekapitulasi penetapan hasil Pemilihan kepala daerah tahun 2024 (gubernur, bupati, wali kota) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) masing-masing provinsi dan kabupaten/kota, terpilih 2 gubernur, 34 bupati, dan 9 wali kota dari perempuan yang unggul berlaga dari 149 calon kepala daerah perempuan (Pancawati, 2024). Artinya, ada sebanyak 30% perempuan calon kepala daerah yang memenangkan kontestasi. Angka ini mencerminkan adanya peningkatan tren positif partisipasi politik perempuan dibandingkan periode-periode sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada perubahan sikap masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan. Masyarakat mulai terbuka dan menerima perempuan sebagai pemimpin, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Salah satu wilayah yang turut menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2024 adalah Kota Semarang. Kota Semarang selama ini dikenal luas sebagai salah satu kota multikultural di Indonesia, yang dihuni oleh masyarakat dari berbagai latar belakang etnis. Tidak hanya didominasi oleh Etnis Jawa sebagai kelompok mayoritas, Kota Semarang juga menjadi tempat bermukimnya Etnis Tionghoa, Etnis Melayu, Etnis India, hingga Etnis Arab. Kehadiran berbagai kelompok etnis ini tidak hanya memperkaya keragaman demografis, tetapi juga berkontribusi besar dalam membentuk dinamika sosial, budaya, dan ekonomi di Semarang. Kehidupan yang harmonis dan toleran antar-etnis di kota ini telah menjadi salah satu kekuatan utama dalam menjaga stabilitas sosial serta menciptakan ruang publik yang inklusif.

Pemilihan Wali Kota Semarang tahun 2024 menghadirkan kontestasi politik yang menarik karena mempertemukan dua pasangan calon dengan konfigurasi dukungan politik yang berbeda secara signifikan. Pasangan nomor urut 1, yaitu Agustina Wilujeng Pramestuti yang berpasangan dengan Iswar Aminudin, diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai tersebut selama ini dikenal sebagai kekuatan politik dominan di Jawa Tengah, dengan basis elektoral yang relatif stabil dan solid, termasuk di Kota Semarang. Dominasi tersebut tidak hanya terlihat dari capaian elektoral dalam pemilu legislatif, tetapi juga dari konsistensi kemenangan dalam sejumlah kontestasi kepala daerah di wilayah provinsi ini.

Di sisi lain, pasangan nomor urut 2 terdiri atas A. Sukawijaya yang lebih dikenal sebagai Yoyok Sukawi bersama Joko Susanto. Pasangan ini memperoleh dukungan koalisi luas dari sembilan partai politik, yakni Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia, serta Partai NasDem. Konfigurasi koalisi yang relatif gemuk tersebut mencerminkan strategi konsolidasi kekuatan politik lintas ideologi yang kerap muncul dalam dinamika pilkada kontemporer.

Fenomena koalisi besar dalam Pemilihan kepala daerah seringkali dimaknai sebagai upaya memperluas basis dukungan elektoral sekaligus meminimalkan fragmentasi suara oposisi. Dalam konteks ini, pertarungan politik tidak semata-mata berbicara mengenai kapasitas personal kandidat, tetapi juga mengenai efektivitas mesin partai, jaringan politik, serta kemampuan mengelola koalisi dalam arena kompetisi lokal. Dengan demikian, Pilkada Kota Semarang 2024 menjadi

ruang yang relevan untuk mengkaji bagaimana struktur dukungan partai dan konfigurasi koalisi memengaruhi dinamika kontestasi politik di tingkat lokal.

Hasil resmi rekapitulasi suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang menunjukkan bahwa pasangan Agustina Wilujeng Pramestuti dan Iswar Aminudin berhasil memenangkan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang tahun 2024. Penetapan tersebut didasarkan pada hasil penghitungan suara sah dalam Pilwakot Semarang 2024 yang menempatkan pasangan ini sebagai peraih suara terbanyak dibandingkan kompetitornya. Secara kuantitatif, pasangan Agustina–Iswar mengumpulkan 486.423 suara atau setara dengan 57,24% dari total suara sah. Adapun pasangan A. Sukawijaya (Yoyok Sukawi) dan Joko Susanto memperoleh 363.331 suara atau 42,76%. Selisih perolehan suara tersebut menunjukkan margin kemenangan yang relatif signifikan dalam konteks kontestasi dua pasangan calon.

Tabel 1.1 Hasil Perolehan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Presentase
1	Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M dan Ir. H. Iswar Aminuddin, M. T	486.423	57,24 %
2	H. A.S Sukawijaya alias Yoyok Sukawi, S.E., M.M dan H. Joko Santoso, S.E., M.M	363.331	42,76 %

Sumber: Berita Acara & Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara oleh KPU Kota Semarang

Fenomena keterpilihan Agustina Wilujeng Pramestuti sebagai Wali Kota Semarang tahun 2024 menjadi sebuah anomali sekaligus tonggak penting dalam

dinamika politik lokal di Indonesia. Selain itu, kemenangan Agustina Wilujeng Pramestuti juga menarik perhatian dalam kontestasi pilkada karena menjadi walikota perempuan pertama di Kota Semarang yang dipilih secara langsung melalui pilkada. Pada periode sebelumnya Wali Kota Semarang dijabat oleh seorang perempuan juga yaitu Hevearita Gunaryanti Rahayu, namun tidak dipilih langsung melalui pemilu. Tetapi meneruskan walikota terpilih pada periode sebelumnya yang kemudian diangkat menjadi kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) yaitu Hendrar Prihadi atau biasa dikenal dengan Hendi.

Kemenangan Agustina Wilujeng Pramestuti dalam Pilkada Semarang 2024 bukan sekadar kemenangan politik saja, melainkan momentum penting dalam konteks representasi perempuan, khususnya mereka dari kelompok minoritas ganda atau bahkan triple. Sebagai seorang perempuan yang berlatar belakang agama non-Muslim (Katolik) dan bukan berasal dari etnis mayoritas di Semarang, Agustina mampu menembus berbagai hambatan simbolik dan struktural yang selama ini menempatkan minoritas secara marginal di ranah politik lokal. Tidak hanya menghadapi kontestasi politik umum, Agustina juga harus melawan norma patriarkis yang menyusup ke budaya politik lokal. Sebagai perempuan dan penganut kepercayaan Katolik, peluang untuk memperoleh kemenangan dalam pilkada tahun 2024 ini sangat kecil dikarenakan menjadi minoritas di tengah-tengah mayoritas penduduk Kota Semarang yang muslim. Berdasarkan data dari BPS Kota Semarang tahun 2023 pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2 Pemeluk Agama di Kota Semarang Tahun 2023

No	Agama	Pemeluk	
		Σ	%
1	Islam	1485169	87 %
2	Kristen	83960	5%
3	Katholik	115684	7%
4	Hindu	9958	<1%
5	Budaya	1165	<1%
6	Lainnya	430	<1%

Sumber: BPS Kota Semarang 2023

Berdasarkan data tabel di atas, penduduk Kota Semarang mayoritas beragama Islam dengan persentase lebih dari 50% yaitu 87% sedangkan penduduk beragama Katolik hanya 7% saja. Hal tersebut menunjukkan peluang Agustin-Iswar untuk memperoleh suara penduduk muslim cukup kecil. Berbanding terbalik dengan lawan politiknya yaitu Yoyok Sukawi dan Joko Santoso yang memiliki kepercayaan agama islam. Lebih lanjut lagi, jika melihat data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang tahun 2023, Katolik merupakan agama minoritas di Kota Semarang bersama agama Kristen, Hindu, Budha dan kepercayaan lainnya.

Temuan survei yang dirilis oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa faktor identitas, khususnya agama, masih menjadi pertimbangan signifikan dalam preferensi politik pemilih menjelang Pemilu 2024. Dalam survei tersebut, responden diberikan pertanyaan terkait preferensi terhadap calon presiden yang akan bertarung pada Pilpres mendatang. Hasilnya memperlihatkan bahwa 50% responden cenderung memilih calon yang

memiliki kesamaan agama dengan dirinya, 45% menyatakan perbedaan agama bukan persoalan utama, sementara 5% lainnya tidak memberikan jawaban pasti. Orang memilih bukan karena calonnya kompeten dan rekam jejaknya bagus, tapi karena agamanya sama (Munjani, 2023).

Menurut Saiful Mujani, temuan ini mengindikasikan bahwa dimensi identitas keagamaan masih memiliki daya pengaruh yang kuat dalam perilaku pemilih di tingkat nasional. Preferensi tersebut menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu, pertimbangan kesamaan identitas dapat menjadi variabel yang tidak kalah dominan dibandingkan aspek rasional seperti kompetensi, rekam jejak, maupun kapasitas kepemimpinan kandidat. Secara lebih luas, kecenderungan ini dapat dibaca sebagai refleksi dari masih kuatnya politik identitas dalam praktik demokrasi elektoral di Indonesia. Orientasi pemilih yang mempertimbangkan faktor agama memperlihatkan bahwa dinamika kontestasi politik tidak sepenuhnya ditentukan oleh isu programatik atau kinerja, melainkan juga oleh faktor sosiologis yang melekat pada individu pemilih. Fenomena tersebut relevan untuk dianalisis lebih lanjut dalam kerangka studi perilaku memilih dan politik identitas dalam demokrasi lokal maupun nasional.

Sejalan dengan survei yang dilakukan oleh SMRC pada tahun 2023, Penelitian yang dilakukan oleh Hanan (2020) mengenai analisis penggunaan politik identitas dalam Pilpres 2019. Hanan menyatakan bahwa korelasi antara etnisitas dan pilihan presiden terlihat jelas. Sebagian besar orang Jawa (67%) memilih Jokowi; sisanya memilih Prabowo. Selain alasan etnis, Hanan juga menjelaskan bahwa agama berperan dalam perilaku pemilih. Pemilih dengan orientasi politik

Islam dan non-Jawa cenderung memilih Prabowo. Sebaliknya, pemilih yang kurang berorientasi politik Islam dan Jawa memilih Jokowi. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Samosir (2019) menjelaskan bahwa agama bukan menjadi faktor utama dalam memilih, melainkan preferensi pemilih memilih berdasarkan perilaku sikap sopan dan santun caleg.

Selain dimensi gender dan agama, faktor etnisitas juga kerap menjadi variabel yang berpengaruh dalam perilaku memilih di Indonesia. Latar belakang etnik kandidat tertentu, khususnya yang berasal dari kelompok non-mayoritas, dalam sejumlah konteks politik lokal dapat memengaruhi tingkat penerimaan elektoral di kalangan pemilih mayoritas. Dalam situasi seperti ini, identitas etnis tidak sekadar menjadi atribut sosial, tetapi dapat bertransformasi menjadi instrumen mobilisasi politik. Temuan empiris yang dikemukakan oleh Kristianus (2016) dalam kajiannya mengenai politik lokal di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa kompetisi politik sering kali berlangsung dalam kerangka solidaritas etnis. Di wilayah dengan komposisi etnis mayoritas tertentu, kecenderungan kemenangan kandidat yang berasal dari kelompok etnis mayoritas tersebut relatif lebih besar. Pola ini semakin terlihat pada daerah otonom baru yang pembentukannya memiliki keterkaitan dengan konfigurasi etnis dominan di wilayah tersebut.

Sejalan dengan itu, penelitian Mujani (2020) dalam studi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 juga memperlihatkan bahwa identitas agama dan etnis menjadi faktor signifikan dalam membentuk preferensi memilih, terutama ketika kandidat yang bersaing merepresentasikan latar belakang identitas yang berbeda secara kontras. Dalam situasi di mana isu agama dan etnis menguat selama

masa kampanye, dimensi identitas cenderung memperoleh ruang lebih besar dalam memengaruhi pilihan politik masyarakat. Dengan demikian, dinamika politik elektoral di tingkat lokal, termasuk dalam Pilkada Kota Semarang 2024, tidak dapat dilepaskan dari kemungkinan interaksi antara faktor programatik dan faktor identitas. Analisis terhadap perilaku memilih menjadi penting untuk memahami sejauh mana identitas etnis berperan dalam membentuk konfigurasi dukungan politik dalam kontestasi tersebut.

Kehadiran kandidat triple minoritas menunjukkan bahwa masyarakat lokal Semarang mulai menggeser orientasi politik mereka dari sekadar mempertimbangkan afiliasi partai atau identitas mayoritas menuju Pemilihan berdasarkan faktor-faktor lain, seperti kredibilitas kandidat, representasi sosial, dan bagaimana figur tersebut mampu mewakili kelompok yang selama ini kurang terwakili. Selain itu, kemunculan kandidat dengan latar belakang identitas minoritas ganda atau bahkan triple minoritas menunjukkan adanya perubahan penting dalam perilaku memilih. Jika pada masa sebelumnya pilihan politik lebih sering dipengaruhi oleh afiliasi partai atau kesamaan identitas mayoritas, kini banyak pemilih mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kredibilitas, rekam jejak, dan kemampuan representasi kandidat terhadap kelompok sosial yang lebih luas (Afriandi et al., 2025; Budi & Razuni, 2025).

Kemudian dari sisi perilaku memilih, pergeseran ini menunjukkan bahwa pemilih tidak semata-mata memilih berdasarkan garis identitas atau propaganda partisan saja. Banyak pemilih mulai melihat lebih jauh ke aspek program, rekam jejak kandidat, serta bagaimana kandidat tersebut dapat menjembatani keragaman

sosial dan ekonomi di wilayah mereka. Perubahan pola perilaku memilih ini sejalan dengan teori perilaku memilih yang menempatkan faktor sosiologis, psikologis, dan rasional sebagai dimensi utama dalam proses pengambilan keputusan.

Berbagai studi terdahulu menunjukkan bahwa perilaku memilih merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai variabel sosial dan demografis. Salah satu penelitian yang relevan dikemukakan oleh Pratiwi (2019) dalam kajiannya mengenai Pemilihan Kepala Daerah Kota Jambi tahun 2018. Penelitian tersebut menemukan bahwa preferensi politik masyarakat tidak terbentuk secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh pendekatan sosiologis yang menempatkan latar belakang sosial individu sebagai determinan utama dalam menentukan pilihan politik.

Dalam kerangka model sosiologis, faktor-faktor seperti usia, asal daerah (misalnya Jawa dan luar Jawa), tempat tinggal (perkotaan atau pedesaan), jenis kelamin, ras dan etnis, status pekerjaan, kondisi sosial-ekonomi, serta orientasi keagamaan menjadi variabel yang turut membentuk perilaku memilih. Temuan ini menegaskan bahwa keputusan elektoral tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional terhadap program atau kapasitas kandidat, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik sosial yang melekat pada individu pemilih. Secara konseptual, pendekatan ini memperlihatkan bahwa identitas sosial dan struktur sosial masyarakat memiliki kontribusi signifikan dalam menjelaskan pola dukungan politik dalam kontestasi lokal.

Penelitian lain yang relevan dikemukakan oleh Istianah et al, (2025) dalam kajiannya mengenai perilaku memilih pada Pilkada Sukabumi tahun 2024. Hasil

penelitian tersebut menunjukkan bahwa pola perilaku memilih di Kota Sukabumi cenderung mengarah pada model rasional-pragmatis. Pemilih menentukan pilihan politiknya berdasarkan pertimbangan manfaat konkret yang dapat diperoleh serta kepentingan langsung yang dirasakan. Temuan ini mengindikasikan adanya kecenderungan perilaku transaksional dalam proses elektoral, di mana keputusan pemilih lebih didasarkan pada kalkulasi rasional dibandingkan pertimbangan nilai ideologis atau kesamaan identitas. Pergeseran tersebut mencerminkan perubahan orientasi partisipasi politik masyarakat, dari yang semula berbasis loyalitas ideologis dan ikatan sosial, menuju preferensi yang lebih berorientasi pada hasil dan keuntungan praktis.

Melemahnya keterikatan emosional terhadap partai maupun kelompok sosial tertentu menjadi salah satu indikator berkurangnya pengaruh faktor identitas dalam menentukan pilihan politik. Dalam konteks ini, perilaku memilih tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh faktor sosiologis, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan rasional yang bersifat instrumental. Perbedaan temuan antara pendekatan sosiologis dan rasional-pragmatis ini menunjukkan bahwa perilaku memilih bersifat dinamis dan kontekstual, sehingga menarik untuk dianalisis lebih lanjut dalam konteks Pilkada Kota Semarang 2024.

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Afriandi et al., (2025) yang meneliti tentang bagaimana perilaku memilih masyarakat minoritas adat dalam menentukan pemimpin. Hasil penelitian menemukan bahwa perilaku memilih masyarakat Kampa dipengaruhi oleh pertama, yaitu preferensi politik yang memilih berdasarkan pertimbangan dari para pemimpin adat, kedua geopolitik di mana

secara geografis daerah yang dihuni adalah mayoritas suku Minangkabau, dan ketiga berdasarkan struktur sosial ekonomi yang memengaruhi alasan rasional untuk memilih kepala daerah.

Berdasarkan berbagai temuan penelitian terdahulu, terlihat bahwa perilaku memilih dapat dipengaruhi oleh faktor identitas maupun pertimbangan rasional-pragmatis yang bersifat kontekstual. Namun demikian, masih terdapat ruang kajian yang perlu dielaborasi lebih lanjut, khususnya terkait bagaimana dinamika tersebut beroperasi ketika kandidat yang berkontestasi berasal dari kelompok minoritas dalam konteks politik lokal. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara mendalam mengenai dinamika perilaku memilih terhadap kandidat minoritas dalam Pemilihan Wali Kota Semarang tahun 2024. Fokus ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana faktor identitas, pertimbangan rasional, serta konfigurasi sosial-politik lokal berinteraksi dalam membentuk preferensi elektoral masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pembahasan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika perilaku memilih dalam Pemilihan Wali Kota Semarang Tahun 2024 terhadap kandidat yang berasal dari kelompok minoritas?
2. Mengapa sebagian pemilih memberikan dukungan kepada kandidat yang dikategorikan sebagai triple minoritas dalam Pilwakot Semarang 2024?

3. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi perilaku memilih dalam menentukan pilihan terhadap kandidat minoritas tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dinamika perilaku memilih dalam Pemilihan Wali Kota Semarang Tahun 2024.
2. Mengidentifikasi alasan pemilih dalam memberikan dukungan kepada kandidat triple minoritas.
3. Mengkaji faktor-faktor sosial, psikologis, rasional, dan politik identitas yang memengaruhi preferensi pemilih dalam kontestasi Pilwakot Semarang 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian ilmu politik, khususnya dalam bidang perilaku memilih (*voting behavior*) dan politik identitas. Selain itu, studi ini memberikan tambahan literatur tentang bagaimana pemilih di Indonesia merespons kandidat dengan latar belakang minoritas dalam kontestasi elektoral. Kemudian penelitian ini juga berusaha memberikan perspektif baru tentang interaksi antara faktor identitas, rasionalitas, dan loyalitas partai dalam memengaruhi perilaku politik pemilih perkotaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis terdapat beberapa manfaat, diantaranya:

1. Bagi partai politik

Memberikan gambaran bagi partai politik dan kandidat tentang pentingnya memahami perilaku memilih secara lebih komprehensif, khususnya di daerah perkotaan yang cenderung lebih heterogen.

2. Bagi masyarakat

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam menambah wawasan dan pengetahuan pada kajian ilmu politik khususnya mengenai perempuan dan minoritas yang menang di dalam Pemilihan kepala daerah. Selain itu, peneliti juga berharap penelitian ini dapat berguna sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama. Studi ini juga dapat menjadi rujukan bagi penyelenggara pemilu dan lembaga demokrasi untuk memperkuat pendidikan politik yang inklusif, sehingga pemilih semakin rasional dan tidak terjebak pada politik identitas sempit.

3. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dengan terjun langsung ke lapangan dan memberikan pengalaman belajar yang menumbuhkan kemampuan dan keterampilan meneliti. Serta dapat digunakan apabila kelak memutuskan terjun ke dunia politik sebagai pengamat, pengajar maupun praktisi.

1.5 Literatur Riview

Pada penelitian ini peneliti mencantumkan hasil penelitian yang memiliki relevansi atau keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sebagai berikut:

Penelitian pertama dilakukan oleh Tokan (2019) berjudul “Analisis Perilaku Pemilih pada Pilkada Kota Kupang Tahun 2017” mengkaji kecenderungan perilaku memilih dalam kontestasi lokal tersebut, khususnya untuk melihat apakah preferensi masyarakat lebih dipengaruhi oleh faktor sosiologis atau psikologis. Studi ini menggunakan kerangka teori perilaku memilih (*votter behavior*) dengan pendekatan sosiologis dan psikologis sebagai landasan analisis. Metode yang digunakan adalah survei deskriptif dengan teknik multistage random sampling.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pemilih di Kota Kupang cenderung memiliki karakter perilaku sosiologis dalam menentukan pilihan politiknya. Proporsi pemilih dengan orientasi sosiologis mencapai 63,50%, sementara pertimbangan psikologis berada pada angka yang lebih rendah, yaitu 21%. Selain itu, terdapat pula pemilih yang menentukan pilihan secara pragmatis, yakni sekitar 15,50%, yang didasarkan pada pemberian bantuan materi menjelang hari pemungutan suara. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa faktor latar belakang sosial memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan faktor psikologis maupun pertimbangan pragmatis dalam Pilkada Kota Kupang 2017. Secara konseptual, penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa dalam konteks politik lokal tertentu,

pendekatan sosiologis masih relevan untuk menjelaskan perilaku memilih masyarakat. Namun demikian, keberadaan pemilih yang bersifat pragmatis juga menunjukkan bahwa dinamika perilaku memilih tidak bersifat tunggal, melainkan dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor kontekstual.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Pratiwi (2019) berjudul “Analisis Perilaku Memilih Pemilihan Kepala Daerah pada Politik Lokal Tahun 2018” berfokus pada analisis perilaku memilih dalam Pilkada Kota Jambi 2018. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan merujuk pada teori perilaku memilih dengan tiga pendekatan utama, yakni sosiologis, psikologis, dan rasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku memilih di Kota Jambi dipengaruhi oleh kombinasi ketiga model tersebut. Dalam pendekatan sosiologis, variabel seperti usia, asal wilayah (Jawa dan luar Jawa), tempat tinggal (perkotaan atau pedesaan), jenis kelamin, ras dan etnis, status pekerjaan, kondisi sosial-ekonomi, serta orientasi keagamaan menjadi faktor yang memengaruhi preferensi politik. Sementara itu, pendekatan psikologis tercermin melalui identifikasi partai, yaitu adanya kedekatan emosional memilih dengan partai politik tertentu. Adapun dalam pendekatan rasional, pilihan politik ditentukan berdasarkan evaluasi subjektif terhadap kondisi ekonomi, politik, dan sosial baik pada tingkat individu maupun masyarakat

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa perilaku memilih di tingkat lokal tidak dapat dijelaskan melalui satu pendekatan tunggal. Sebaliknya,

preferensi politik terbentuk melalui interaksi antara latar belakang sosial, kedekatan psikologis dengan partai, serta pertimbangan rasional yang bersifat kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan multidimensional dalam memahami dinamika perilaku memilih pada kontestasi politik lokal.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Febriani (2018) berjudul “Analisis Perilaku Pemilih (Voting Behavior) Pemula Wilayah Jakarta Barat Menjelang Pemilihan Umum 2019”. Berfokus pada identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pemilih pemula. Studi ini menggunakan kerangka teori perilaku memilih dengan tiga pendekatan utama, yaitu sosiologis, psikologis, dan rasional, untuk menganalisis kecenderungan pilihan politik generasi pemilih baru. Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif melalui survei terhadap 500 responden yang ditentukan dengan teknik cluster sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel sosiologis, psikologis, dan rasional terhadap perilaku memilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pilihan rasional memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku memilih, pemilih pemula, sedangkan faktor sosiologis dan psikologis tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa dalam konteks pemilih pemula di wilayah perkotaan, pertimbangan rasional cenderung lebih dominan dibandingkan ikatan sosial maupun kedekatan emosional terhadap partai atau kelompok tertentu. Dengan demikian, penelitian ini

memperlihatkan adanya variasi pola perilaku memilih yang dipengaruhi oleh karakteristik demografis dan konteks sosial yang berbeda.

Penelitian keempat dilakukan oleh Rasyid et al. (2021) berjudul “Kemenangan Kandidat Khonghucu pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Manado” berfokus pada analisis strategi politik yang digunakan oleh Andrei Angouw dalam memenangkan kontestasi Pilkada Manado 2020. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dengan kerangka teori strategi politik Schroder yang dipadukan dengan perspektif praktik sosial Pierre Bourdieu. Analisis difokuskan pada pemanfaatan berbagai bentuk modal, yakni modal politik, sosial, ekonomi, kultural, dan simbolik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemenangan Andrei Angouw tidak terlepas dari akumulasi dan konversi berbagai jenis modal yang dimilikinya. Dari sisi modal politik, posisinya sebagai anggota sekaligus Ketua DPRD Sulawesi Utara menjadi sumber legitimasi dan jaringan kekuasaan yang signifikan. Modal sosial tercermin melalui citra personal yang dianggap dekat dan mudah berbaur dengan masyarakat. Modal ekonomi diperoleh dari latar belakangnya sebagai pengusaha, yang turut menunjang pembiayaan politik dalam kontestasi. Sementara itu, modal kultural tampak dari latar belakang keluarga yang mencerminkan nilai toleransi, meskipun ia berasal dari etnis Tionghoa dan beragama Khonghucu. Akumulasi berbagai bentuk modal tersebut kemudian bertransformasi menjadi modal simbolik yang memperkuat legitimasi politiknya di ruang publik. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kandidat yang berasal dari kelompok minoritas tidak semata-mata

ditentukan oleh identitasnya, tetapi juga oleh kemampuan mengelola dan mengonversi modal sosial-politik yang dimiliki dalam arena kontestasi lokal.

Penelitian kelima dilakukan oleh Nur Nafisah (2023) yang berjudul “Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah: Keberhasilan Dewanti Rumpoko Memenangkan Pilkada Kota Batu Periode 2017–2022” mengkaji faktor-faktor yang mendukung kemenangan kandidat perempuan dalam kontestasi politik lokal. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan secara mendalam dinamika keberhasilan Dewanti Rumpoko dalam Pilkada Kota Batu 2017.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemenangan Dewanti dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, dukungan partai politik pengusung dan koalisi yang solid, dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai kekuatan utama. Kedua, adanya ikatan politik kekerabatan yang kuat, mengingat Dewanti merupakan istri dari mantan Wali Kota Batu dua periode sebelumnya, Eddy Rumpoko, sehingga memiliki jaringan dan basis dukungan yang telah terbangun. Ketiga, latar belakang serta rekam jejak politik yang cukup panjang, yang memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap kapasitas kepemimpinannya. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kandidat perempuan dalam politik lokal tidak semata-mata ditentukan oleh faktor gender, tetapi juga oleh dukungan struktural partai, jaringan sosial-politik, serta modal pengalaman yang dimiliki kandidat. Dengan demikian, studi ini memberikan perspektif bahwa identitas sebagai

perempuan dapat berinteraksi dengan faktor institusional dan jaringan kekuasaan dalam membentuk kemenangan elektoral.

Penelitian keenam dilakukan oleh Samosir (2019) yang berjudul “Belajar Demokrasi dari Jawa Barat: Keterpilihan Caleg Kristen pada Pileg 2014 dan 2019” berfokus pada analisis keterpilihan calon legislatif beragama Kristen di wilayah Jawa Barat yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka teori Alan Ware mengenai tiga level faktor keterpilihan, yaitu ideologi partai, program partai, dan figur pribadi, dengan penekanan pada posisi tokoh atau figur sebagai faktor dominan dalam memengaruhi pilihan pemilih.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan caleg Kristen tidak bertumpu pada identitas agama semata, melainkan pada kemampuan membangun kedekatan kultural dan sosial dengan memilih mayoritas. Para caleg tersebut memanfaatkan tradisi agama dan budaya lokal sebagai medium pendekatan politik, serta merespons kebutuhan praktis jangka pendek masyarakat. Dari sisi pemilih, dukungan terhadap caleg Kristen tidak didasarkan pada sentimen emosional berbasis agama, namun juga tidak sepenuhnya mencerminkan rasionalitas instrumental dalam kerangka rational choice. Sebaliknya, pilihan politik muncul dari kombinasi sikap personal kandidat yang santun, kemampuan beradaptasi dengan nilai-nilai lokal, pengalaman historis yang dianggap relevan, serta pertimbangan pragmatis-ekonomis. Temuan ini memperlihatkan bahwa keterpilihan kandidat minoritas agama dalam konteks mayoritas berbeda dimungkinkan melalui strategi

adaptasi sosial dan pembentukan citra personal yang inklusif. Dengan demikian, faktor identitas tidak selalu menjadi penghalang determinan dalam kontestasi politik, melainkan dapat dinegosiasikan melalui strategi politik yang tepat.

Penelitian yang ketujuh dilakukan oleh Zakina (2016) yang berjudul “Politik Etnisitas dan Compliance Gaining Kandidat Minoritas dalam Pilkada Kalimantan Barat” mengkaji peran politik etnisitas serta strategi komunikasi dalam keterpilihan pasangan Cornelis dan Christiandy Sanjaya pada Pilkada Kalimantan Barat. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis bagaimana cross cutting affiliation berbasis agama dan etnis dimanfaatkan sebagai bagian dari strategi politik identitas, serta bagaimana pola compliance gaining diterapkan selama masa kampanye.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan Cornelis–Christiandy menerapkan kombinasi pendekatan modern dan tradisional dalam strategi kampanye mereka. Politik etnisitas diwujudkan baik melalui komunikasi nonverbal, seperti penggunaan atribut, simbol, pakaian, dan representasi identitas kultural tertentu, maupun melalui komunikasi verbal yang bersifat asertif dalam forum dialog dan debat publik. Selain itu, strategi cross cutting affiliation yang menghubungkan berbagai kelompok agama dan etnis berperan signifikan dalam memperluas dukungan di sejumlah kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Temuan ini menegaskan bahwa kandidat minoritas dapat membangun legitimasi politik melalui strategi komunikasi yang mampu menjembatani perbedaan identitas sosial. Politik etnisitas dalam konteks ini

tidak semata-mata menjadi alat eksklusif, tetapi dapat dikelola secara inklusif melalui pendekatan simbolik dan jaringan lintas identitas.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Pora et al. (2021) berjudul “Menangkal Politik Identitas: Analisis Kemenangan HT-Zadi pada Pemilihan Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015” mengkaji faktor-faktor yang mendorong keterpilihan pasangan Hendrata Thes dan Zulfahri Abdullah (HT-Zadi), meskipun salah satu kandidat berasal dari kelompok agama dan etnis minoritas di Kabupaten Kepulauan Sula. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengungkap strategi dan dinamika politik yang berkontribusi terhadap kemenangan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan HT-Zadi tidak semata-mata ditentukan oleh faktor identitas, tetapi oleh efektivitas strategi kampanye dan pengelolaan isu politik. Strategi yang diterapkan antara lain pembentukan tim kampanye yang solid hingga tingkat desa, pendekatan langsung kepada pemilih melalui metode door to door, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi politik. Selain itu, konteks kekecewaan publik terhadap pemerintahan sebelumnya turut menjadi faktor yang memengaruhi preferensi pemilih. Dalam menghadapi isu politik identitas yang dimobilisasi oleh lawan politik, pasangan HT-Zadi merespons dengan menekankan program-program unggulan di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan sebagai basis legitimasi elektoral. Temuan ini memperlihatkan bahwa dalam kontestasi lokal, politik identitas tidak selalu menjadi determinan utama dalam menentukan hasil Pemilihan. Kandidat minoritas tetap memiliki

peluang elektoral apabila mampu membangun strategi kampanye yang efektif, menawarkan program substantif, serta merespons konteks sosial-politik secara adaptif.

Penelitian kesembilan dilakukan oleh Yuliani & Ardianto (2020) yang berjudul “Bagaimana Kandidat Minoritas Memenangkan Pilkada: Analisis Strategi Politik dalam Bingkai Bourdieusian” mengkaji strategi politik yang dijalankan oleh Budhi Sarwono dalam Pilkada Banjarnegara 2017, meskipun ia berhadapan dengan kandidat petahana. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis praktik sosial kandidat dalam konteks politik lokal tertentu.

Dengan menggunakan perspektif Pierre Bourdieu, penelitian ini menempatkan keberhasilan kandidat dalam relasi antara habitus masyarakat, struktur ranah politik, dan akumulasi berbagai bentuk modal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kemenangan Budhi Sarwono merupakan hasil dari pertemuan antara habitus warga yang diliputi kekecewaan terhadap kondisi infrastruktur dengan situasi ranah politik yang mempertemukannya dengan petahana, serta kemampuan kandidat mengoptimalkan modal sosial-kultural, ekonomi, dan politik yang dimilikinya. Kombinasi tersebut menciptakan kesesuaian antara kebutuhan masyarakat dan strategi politik yang dijalankan. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas strategi politik tidak dapat dilepaskan dari kemampuan kandidat membaca konfigurasi ranah, memahami habitus pemilih, serta mengelola modal yang tersedia secara adaptif. Dalam konteks kandidat minoritas, termasuk dari latar belakang etnis

tertentu, keberhasilan elektoral sangat bergantung pada kecermatan dalam menyesuaikan praktik sosial dengan dinamika lokal yang berkembang.

Penelitian kesepuluh dilakukan Firmansyah & Faradhila (2022) yang berjudul “Modal Politik Kandidat Perempuan dalam Pemilihan Umum: Studi Kasus Dewi Noviany dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020” bertujuan mengidentifikasi berbagai bentuk modal yang dimiliki kandidat perempuan dalam kontestasi politik lokal. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, serta mengacu pada teori modal Pierre Bourdieu dalam *The Forms of Capital* yang meliputi modal ekonomi, sosial, dan budaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Dewi Noviany dalam Pilkada Sumbawa 2020 tidak terlepas dari akumulasi dan pengelolaan berbagai bentuk modal. Dalam aspek modal politik, ia memperoleh dukungan mesin partai, elit lokal, serta jaringan kekeluargaan dengan pimpinan daerah yang sedang menjabat. Selain itu, keberadaan tim pemenang yang berpengalaman turut memperkuat kapasitas elektoralnya. Dari sisi modal sosial, legitimasi diperoleh melalui kedekatan dengan figur publik serta pengalaman sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang membangun kepercayaan masyarakat. Sementara itu, meskipun pasangan ini memiliki keterbatasan dalam modal ekonomi, strategi kampanye yang efektif dan dukungan jaringan politik mampu mengkompensasi kekurangan tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa dalam konteks kandidat perempuan, dominasi modal politik dan sosial dapat menjadi faktor penentu yang lebih signifikan

dibandingkan modal ekonomi. Dengan strategi yang tepat dan dukungan struktural yang solid, keterbatasan finansial tidak selalu menjadi hambatan utama dalam meraih kemenangan elektoral.

Penelitian kesebelas Kartika (2019) yang berjudul “Modal Kandidat Perempuan dalam Pilkada Tahun 2017 (Studi Kasus: Tjhai Chui Mie sebagai Wali Kota Terpilih di Kota Singkawang)” bertujuan menganalisis pemanfaatan berbagai bentuk modal dalam kemenangan kandidat perempuan pada kontestasi politik lokal. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen, serta mengacu pada teori modal Pierre Bourdieu yang meliputi modal sosial, ekonomi, budaya, dan simbolik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tjhai Chui Mie berhasil mengoptimalkan keempat bentuk modal tersebut dalam Pilkada Singkawang 2017. Modal sosial dibangun melalui aktivitas sosial yang konsisten dan jaringan yang luas sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Modal ekonomi tercermin dari kapasitas finansial yang memadai untuk mendukung aktivitas kampanye. Modal budaya terlihat dari latar belakang pendidikan formal serta identitas kultural sebagai bagian dari etnis Tionghoa Hakka. Sementara itu, modal simbolik terbentuk dari rekam jejak politik sebagai anggota DPRD selama tiga periode, yang kemudian memperkuat legitimasi dan citra publiknya. Penelitian ini menegaskan bahwa akumulasi dan konversi berbagai bentuk modal menjadi faktor penting dalam keberhasilan kandidat perempuan, khususnya yang berasal dari latar belakang etnis minoritas.

Transformasi modal sosial, ekonomi, dan budaya menjadi modal simbolik memperlihatkan bagaimana legitimasi politik dapat dibangun secara strategis dalam arena kontestasi lokal.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa perilaku memilih dalam kontestasi politik lokal dipengaruhi oleh beragam faktor, baik yang bersifat sosiologis, psikologis, maupun rasional. Sejumlah penelitian menunjukkan dominasi pendekatan sosiologis dalam menjelaskan preferensi politik masyarakat, sementara studi lain menegaskan peran pertimbangan rasional dan pragmatis dalam menentukan pilihan elektoral. Di sisi lain, terdapat pula kajian yang menyoroti keterpilihan kandidat minoritas baik dari aspek agama, etnis, maupun gender yang dianalisis melalui pendekatan strategi politik, politik identitas, serta teori modal dalam perspektif Bourdieusian.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut cenderung berfokus pada dua aspek secara terpisah, yakni perilaku memilih sebagai variabel utama atau strategi kandidat minoritas dalam meraih kemenangan. Belum banyak kajian yang secara spesifik mengintegrasikan analisis dinamika perilaku memilih dengan konteks keberadaan kandidat yang memiliki identitas minoritas secara simultan dalam satu arena kontestasi politik lokal. Dengan kata lain, ruang kajian mengenai bagaimana pemilih memaknai dan merespons kandidat yang dikategorikan sebagai triple minoritas dalam konteks pilkada masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menempatkan pemilih sebagai fokus utama analisis, serta mengkaji bagaimana faktor sosial, identitas, dan pertimbangan rasional berinteraksi dalam membentuk preferensi terhadap kandidat triple minoritas pada Pemilihan Wali Kota Semarang Tahun 2024. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan konseptual dalam memperkaya kajian perilaku memilih dan politik identitas dalam demokrasi lokal di Indonesia.

1.6 Landasan Teoritis

1.6.1 Teori Minoritas dalam Politik

Kelompok minoritas merupakan bagian dari struktur sosial yang keberadaannya hampir selalu ditemukan dalam setiap masyarakat. Dalam konteks negara-bangsa modern, kehadiran kelompok minoritas menjadi konsekuensi dari keberagaman identitas yang melekat pada warga negara. Kategori minoritas umumnya ditentukan berdasarkan perbedaan identitas tertentu dibandingkan kelompok mayoritas, seperti agama, bahasa, etnis, budaya, maupun orientasi seksual. Secara kuantitatif, kelompok minoritas biasanya memiliki jumlah yang lebih kecil dibandingkan populasi dominan, sehingga menempati posisi yang tidak dominan dalam struktur sosial dan politik.

Kondisi non-dominan tersebut seringkali menempatkan kelompok minoritas dalam posisi subordinat dalam relasi sosial. Situasi ini mendorong terbentuknya solidaritas internal yang relatif kuat di antara anggota kelompok sebagai mekanisme untuk mempertahankan identitas

kolektif dan keberlangsungan eksistensi sosial mereka. Dengan demikian, keminoritasan tidak hanya dipahami dari aspek numerik, tetapi juga dari dimensi relasi kuasa dan posisi sosial dalam masyarakat.

Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendefinisikan kelompok minoritas melalui dua pendekatan utama. Secara leksikal, minoritas dapat dimaknai sebagai kelompok yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan keseluruhan populasi pada tingkat nasional. Namun, konsep minoritas tidak semata-mata merujuk pada jumlah, melainkan juga pada posisi pengaruh dalam struktur sosial-politik. Dalam pengertian ini, kelompok minoritas dipahami sebagai kelompok yang tidak dominan serta berpotensi mengalami perlakuan diskriminatif atau berada dalam situasi yang kurang menguntungkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, Komnas HAM juga menguraikan ruang lingkup kelompok minoritas berdasarkan karakteristik sosial dan identitas tertentu yang relevan dengan realitas kemajemukan masyarakat Indonesia. Selain itu Komnas HAM juga menawarkan ruang lingkup kelompok minoritas untuk konteks Indonesia adalah:

1. Kelompok Minoritas Ras

Kelompok minoritas ras merujuk pada kelompok yang secara historis dan sosial mengalami pembedaan berdasarkan karakteristik rasial tertentu. Dalam konteks Indonesia, Komnas HAM memberi perhatian khusus pada kelompok masyarakat Tionghoa, kelompok

etnis-agama seperti Sikh, Yahudi, Tao, dan komunitas lain yang memiliki latar belakang rasial maupun keagamaan yang berbeda dari mayoritas. Selain itu, dalam kerangka Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, kategori orang asli Papua juga termasuk dalam kelompok yang memperoleh pengakuan khusus terkait posisi sosial dan historisnya.

2. Kelompok Minoritas Etnis

Etnis dipahami sebagai pengelompokan sosial yang didasarkan pada kesamaan unsur budaya, seperti nilai, norma, adat istiadat, sejarah, bahasa, serta hubungan kekerabatan. Bahasa menjadi salah satu elemen penting dalam membedakan identitas etnis antar kelompok. Keberagaman etnis yang tercermin dari perbedaan bahasa dan praktik budaya menunjukkan tingginya tingkat pluralitas masyarakat Indonesia. Dalam situasi tertentu, kelompok etnis yang jumlahnya lebih kecil atau berada di luar dominasi sosial dapat dikategorikan sebagai minoritas etnis.

3. Kelompok Minoritas Agama dan Keyakinan

Dalam praktik kebijakan negara, terdapat pengakuan formal terhadap enam agama sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965. Pengaturan ini berdampak pada adanya perbedaan tingkat pengakuan dan fasilitas terhadap kelompok kepercayaan di luar agama-agama tersebut. TAP MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

(GBHN) juga menegaskan bahwa aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak dikategorikan sebagai agama. Dalam konteks ini, kelompok penganut kepercayaan tertentu berpotensi berada dalam posisi non-dominan atau kurang diuntungkan dalam kehidupan sosial-politik.

4. Kelompok Penyandang Disabilitas

Kelompok penyandang disabilitas mencakup individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama. Dalam interaksi dengan berbagai hambatan struktural maupun sosial, kondisi tersebut dapat membatasi partisipasi penuh dan setara dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif hak asasi manusia, kelompok ini dipandang sebagai bagian dari minoritas yang memerlukan perlindungan terhadap potensi diskriminasi.

5. Kelompok Minoritas Berdasarkan Identitas Gender dan Orientasi Seksual

Kategori ini mencakup individu dengan identitas gender dan orientasi seksual yang berbeda dari norma dominan dalam masyarakat, termasuk kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Interseks). Dalam banyak konteks sosial, kelompok ini menghadapi risiko diskriminasi, stigma, serta kekerasan akibat perbedaan identitas yang dimiliki, sehingga dapat dikategorikan sebagai kelompok minoritas dalam perspektif hak asasi manusia.

Minoritas merupakan kelompok yang secara numerik lebih kecil dibandingkan dengan kelompok dominan dalam suatu masyarakat, tetapi definisinya melampaui sekadar jumlah atau statistik. Minoritas adalah kelompok yang memiliki identitas yang berbeda dari kelompok mayoritas baik itu dalam hal etnis, budaya, bahasa, agama, atau karakteristik lain yang menonjol dan diakui oleh masyarakat (Schneider & Crul, 2014). Identitas ini menjadikan mereka unik, namun sering kali membuat mereka berada dalam posisi yang kurang berdaya dalam hal akses, pengaruh, dan representasi. Posisi yang tidak seimbang ini mengakibatkan minoritas cenderung rentan terhadap diskriminasi dan keterbatasan dalam memperoleh hak yang seharusnya dijamin secara setara (Carter, 2021).

Dalam kerangka sosial, minoritas memiliki hubungan yang kompleks dengan kelompok mayoritas. Minoritas tidak hanya berperan sebagai bagian dari keberagaman masyarakat, tetapi juga sering kali menghadapi tantangan yang khas karena perbedaan identitas mereka (Healey et al., 2018). Mereka mungkin berhadapan dengan stigma sosial, prasangka, atau stereotip yang tertanam dalam masyarakat luas. Kondisi ini menciptakan hambatan struktural dan sosial yang mempersempit ruang gerak mereka dalam mengakses layanan dasar, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, atau menjalankan kehidupan sehari-hari. Kesenjangan akses ini mempertegas posisi mereka sebagai kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat, sehingga mereka membutuhkan perlindungan khusus untuk mencapai kesetaraan.

Dari sudut pandang politik, minoritas sering kali memiliki representasi yang lebih kecil dalam proses pengambilan keputusan. Posisi minoritas yang kurang terwakili mengakibatkan mereka memiliki pengaruh yang lebih terbatas dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan mereka sendiri (Koch, 2019). Ketidakseimbangan representasi ini juga berpotensi menimbulkan kebijakan yang kurang memperhatikan kebutuhan atau aspirasi minoritas, mengakibatkan ketidakadilan dalam implementasi kebijakan. Ketidaksetaraan ini menciptakan jurang antara minoritas dan kelompok dominan dalam masyarakat, dan sering kali minoritas harus berjuang untuk memperoleh suara yang lebih besar dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Secara budaya, minoritas menyimpan kekayaan yang memperkaya keragaman masyarakat. Identitas budaya minoritas sering kali mencakup bahasa, tradisi, nilai, dan sistem kepercayaan yang berbeda dari norma dominan (Allen, 2023). Keberagaman budaya ini memiliki nilai yang penting dalam membangun karakter dan identitas suatu bangsa secara keseluruhan. Namun, minoritas sering kali berada di bawah tekanan untuk berasimilasi, yaitu mengadopsi nilai dan norma dari kelompok dominan yang secara tidak langsung mengharuskan mereka meninggalkan identitas asli mereka. Proses asimilasi ini dapat berdampak negatif pada minoritas, karena identitas dan tradisi mereka dapat terkikis atau bahkan hilang seiring waktu.

Untuk melindungi keberagaman budaya, penting bagi minoritas untuk memiliki ruang yang aman dan kesempatan untuk mempertahankan dan mengembangkan identitas budaya mereka tanpa adanya tekanan eksternal. Hambatan struktural seringkali mempersempit peluang ekonomi bagi minoritas, menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam hal kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. Kesenjangan ini dapat mengakar dan berlanjut lintas generasi, membentuk pola kemiskinan yang sulit dipecahkan. Minoritas yang tidak memiliki akses yang setara terhadap pendidikan atau pelatihan keterampilan, misalnya, mungkin kesulitan untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Hal ini menciptakan lingkaran ketidaksetaraan di mana minoritas tidak hanya menghadapi kendala ekonomi, tetapi juga terbatas dalam kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Konsep minoritas dalam politik berangkat dari pemikiran bahwa dalam masyarakat demokratis, tidak semua kelompok sosial memiliki akses yang setara terhadap kekuasaan. Robert Dahl (2008) dalam teorinya tentang *polyarchy* menjelaskan bahwa kelompok mayoritas cenderung mendominasi arena politik, sementara kelompok minoritas menghadapi hambatan struktural dan kultural dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Minoritas dapat dikategorikan dalam berbagai bentuk, antara lain agama, etnis, gender, dan kelas sosial. Dalam konteks politik, posisi minoritas seringkali diasosiasikan dengan kerentanan, keterpinggiran, serta kemungkinan terjadinya diskriminasi (Horowitz, 2000).

Konsep triple minoritas dapat dipahami melalui teori interseksionalitas yang diperkenalkan Kimberle Crenshaw (1989). Crenshaw menunjukkan bahwa identitas sosial seseorang tidak dapat dilihat secara tunggal, melainkan saling berkelindan. Seorang perempuan dari agama minoritas dan etnis minoritas, misalnya, mengalami bentuk marginalisasi yang berbeda dibanding perempuan dari kelompok mayoritas. Perspektif interseksionalitas membantu memahami bahwa kombinasi identitas minoritas menciptakan kerentanan politik yang khas. Dalam politik Indonesia, minoritas agama, etnis, dan gender masih menghadapi tantangan signifikan. Aspinall & Mietzner (2019) bahwa politik identitas berbasis agama dan etnis seringkali menjadi faktor dominan dalam pemilu. Sementara itu, keterwakilan perempuan masih terbatas meski ada kebijakan afirmatif (30% kuota caleg perempuan), sehingga kemenangan kandidat perempuan tetap menjadi fenomena yang langka (Budiatri, 2012).

Dengan demikian, teori minoritas dalam politik memberikan kerangka dasar untuk memahami posisi Agustina Wilujeng Pramestuti sebagai kandidat dengan identitas triple minoritas (perempuan, Katolik, non-Jawa) dalam Pilwakot Semarang 2024.

1.6.2 Teori Perilaku Memilih (*Votter Behavior Theory*)

Perilaku memilih berkaitan dengan pola tindakan dan preferensi individu dalam proses Pemilihan umum, khususnya dalam menentukan pilihan terhadap kandidat maupun partai politik tertentu. Konsep ini

menitikberatkan pada bagaimana individu membentuk sikap politik, menilai alternatif yang tersedia, serta mengambil keputusan elektoral dalam suatu kontestasi politik. Dengan demikian, perilaku memilih tidak hanya mencerminkan pilihan akhir pada hari pemungutan suara, tetapi juga mencakup proses kognitif, afektif, dan sosial yang melatarbelakangi keputusan tersebut.

Dalam perspektif perilaku politik secara umum, tindakan individu dapat dikategorikan ke dalam perilaku yang sesuai dengan norma dan aturan institusional serta perilaku yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Dalam konteks pemilihan umum, perilaku politik yang sesuai norma diwujudkan melalui partisipasi yang mengikuti prosedur dan aturan demokratis, seperti kampanye yang tertib, kompetisi yang fair, serta penghormatan terhadap hasil pemilu. Sebaliknya, perilaku politik yang menyimpang dapat muncul dalam bentuk pelanggaran aturan, praktik intimidasi, maupun kekerasan politik yang berpotensi mengganggu proses demokrasi.

Fenomena kekerasan dalam masa kampanye, seperti benturan antar pendukung partai politik atau intimidasi terhadap kelompok pemilih tertentu, merupakan contoh ekspresi perilaku politik yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. Namun demikian, dalam kajian perilaku memilih, perhatian utama tidak hanya tertuju pada aspek normatif tersebut, melainkan pada bagaimana individu membentuk preferensi politiknya

berdasarkan faktor sosial, psikologis, maupun pertimbangan rasional yang berkembang dalam konteks tertentu.

Perilaku memilih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat diklasifikasikan ke dalam dimensi internal dan eksternal. Faktor internal merujuk pada karakteristik individu, seperti orientasi nilai, sikap politik, tingkat pendidikan, serta preferensi ideologis yang membentuk cara seseorang memandang pilihan politik. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang turut memengaruhi proses pembentukan keputusan elektoral. Interaksi antara kedua dimensi tersebut menghasilkan variasi pola perilaku memilih dalam setiap konteks Pemilihan.

Dalam kajian ilmu politik, perilaku memilih umumnya dianalisis melalui tiga pendekatan utama, yaitu The Columbia Study, The Michigan Model, dan Rational Choice (Bartels, 2010). Ketiga pendekatan ini dikenal pula sebagai pendekatan sosiologis, psikologis, dan rasional.

a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang pertama kali muncul dan berkembang dalam kajian yang melihat serta menganalisa perilaku memilih. Pendekatan ini berkembang sejak tahun 1950-an di Eropa serta Amerika dan sering pula disebut sebagai Mazhab Columbia. Adapun penyebutan Mazhab Columbia sebagai nama lain dari pendekatan sosiologis sebab pendekatan tersebut dikembangkan dari studi-studi sosiolog asal *Columbia University*

seperti Paul F. Lazarsfeld serta rekannya Bernard Berelson dan Hazel Gaudet. Pendekatan ini berangkat dari teori lingkaran sosial yang diperkenalkan oleh Georg Simmel. Simmel melihat bahwa setiap manusia memiliki keterikatan di dalam berbagai lingkaran sosial atau kelompok sosial, seperti keluarga, pertemanan, lingkungan tempat kerja dan kelompok-kelompok lainnya baik formal maupun informal. Lingkaran sosial ini yang kemudian berperan besar dalam memberikan pengalaman kelompok yang membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang (Asmadi et al., 2019).

Berangkat dari pemikiran Georg Simmel tersebut, Lazarsfeld mengidentifikasikan bahwa karakteristik sosial yang melekat dalam diri seseorang pada saat berada di suatu lingkaran sosial seperti status sosial dan ekonomi, jenis kelamin, agama, etnis, domisili, profesi atau pekerjaan serta usia menjadi indikator penting yang mempengaruhi pemilih pada saat memutuskan untuk memberikan suara pada seorang kandidat. Dengan demikian pada dasarnya, pendekatan sosiologis berusaha untuk melihat perilaku memilih dari elemen-elemen yang berkaitan dengan sosial-kemasyarakatan melalui tiga indeks utama yakni status sosial-ekonomi (latar belakang pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan kelas sosial), agama, dan daerah tempat tinggal (Syafhendry, 2016).

b. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis berkembang pada awal tahun 1950-an. Pendekatan psikologis dikembangkan pertama kali oleh University of Michigan's Survey Research Centre yang kemudian dikenal dengan mazhab Michigan di Amerika Serikat. Hasil penelitian kelompok ini dikenal dengan *The American Voter* (1960) dan *The Voters Decide* (1954) yang ditulis oleh Campbell, Converse, Miller, dan Stokes. Menurut Roth (2008) pendekatan psikologis berusaha untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keputusan Pemilu melalui trias determinan: identifikasi partai (*Party ID*); orientasi terhadap isu, dan orientasi kepada para kandidat.

Identifikasi partai dapat dipahami sebagai adanya rasa keterikatan secara psikologis seperti rasa suka maupun perasaan senang seseorang terhadap suatu partai yang pada akhirnya membuat seseorang tersebut secara sadar mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari partai atau kelompok tersebut. Wujud dari identifikasi partai dalam diri seseorang tidak selalu berkaitan dengan keanggotaan orang tersebut pada suatu partai yang disukainya tetapi lebih kepada preferensi yang dipegang seorang individu terhadap suatu partai karena merasa selaras dan sejalan dengan eksistensi partai tersebut (Syafhendry, 2016).

Faktor determinan selanjutnya yakni orientasi terhadap kandidat. Faktor orientasi terhadap kandidat dari sudut pandang

pendekatan psikologis memiliki logika yang sejalan dengan identifikasi partai. Faktor ini meyakini bahwa keputusan memilih terhadap seorang kandidat turut didasarkan pada ikatan emosional yang dihasilkan dari proses sosialisasi (Haryanti, 2022). Oleh karena itu, faktor ini melihat bahwa seorang pemilih umumnya akan memberikan suara kepada kandidat yang lebih dikenalnya. Sementara itu, kedekatan emosional yang terbangun dengan kandidat dapat diperlihatkan dalam bentuk perilaku seorang pemilih. Pada umumnya, semakin kuat ikatan emosional yang terjalin, maka perilaku yang ditunjukkan cenderung semakin aktif dan interaktif.

Lalu faktor orientasi tema atau isu melihat bahwa semakin menarik dan selaras suatu isu yang dibawa oleh kandidat calon dengan isu yang diharapkan oleh pemilih maka semakin besar peluang untuk pemilih tersebut akan berpartisipasi dalam Pemilihan dan memberikan suaranya kepada kandidat atau partai tersebut. Dalam pendekatan psikologis adanya ketertarikan atau dorongan secara psikologis dapat membentuk orientasi politik seseorang. Adanya ikatan psikologis tersebut disebabkan oleh adanya perasaan 'kedekatan' dengan suatu partai atau kandidat tertentu. Persepsi dan penilaian individu terhadap seorang kandidat atau isu yang diangkat sangat berpengaruh terhadap pilihan pemilu. Pendekatan psikologis ini menekankan pada identifikasi partai politik atau ikatan emosional

terhadap suatu partai politik dan orientasi terhadap calon atau kandidat.

c. Pilihan Rasional

Fokus pada pendekatan pilihan rasional adalah pertimbangan pemilih berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dan manfaat yang akan didapatkan atau yang biasa disebut cost and benefit analysis. Seorang pakar dalam teori ekonomi yang berkaitan erat dengan dasar pemikiran pendekatan rational choice, Anthony Downs mengungkapkan bahwa pada hakikatnya seorang individu adalah makhluk ekonomi atau homo economicus, yang mengedepankan pemenuhan kebutuhannya sendiri dibandingkan pihak lain.

Secara lebih konkret, Downs menerangkan bahwa seorang pemilih yang menentukan pilihannya secara rasional hanya akan memperjuangkan kepentingannya sendiri, kendatipun tidak, ia akan berusaha untuk mengupayakan kepentingan pribadinya di atas kepentingan pihak lain yang demikian disebut sebagai self-interest axion. Secara lebih jelas, seseorang pemilih yang mengedepankan pertimbangannya dengan prinsip rasionalitas akan berupaya memilih opsi dengan kriteria bahwa opsi tersebut adalah yang paling menguntungkan (maximum gained) atau yang paling sedikit memberikan kerugian serta memiliki risiko yang lebih kecil (least risk) di antara berbagai opsi yang tersedia (Widnyani, 2020).

Dengan demikian, pendekatan *rational choice* merupakan pendekatan yang melihat bahwa seseorang akan memilih calon kandidat atau suatu partai berdasarkan pertimbangan sejauh mana kandidat atau partai yang akan berkuasa tersebut dapat menjanjikan dan memberikan kemaslahatan serta keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan kandidat dan partai lain terhadap kepentingan yang dimilikinya. Keputusan dalam memilih atau tidak memilih sangat bergantung pada hasil yang akan dicapai oleh partai atau kandidat tertentu kelak pada saat menduduki jabatan di pemerintahan, baik hasil yang diharapkan terjadi maupun yang diantisipasi.

Hal ini juga dapat terjadi karena seorang pemilih secara rasional melakukan evaluasi terhadap kinerja dari partai yang telah berkuasa, semakin positif hasil yang diberikan semasa partai tersebut berkuasa maka peluang calon kandidat dari partai yang sama untuk dipilih kembali akan semakin besar, begitupun sebaliknya ketika hasil yang dirasakan negatif maka akan semakin kecil peluang untuk dipilih kembali sebagai partai yang berkuasa (Syafhendry, 2016).

1.6.3 Teori Politik Identitas

Politik identitas adalah konsep yang menjelaskan bagaimana identitas sosial seperti agama, etnis, gender, maupun bahasa menjadi dasar pembentukan sikap dan perilaku politik individu maupun kelompok. Identitas tersebut tidak hanya bersifat personal, tetapi juga memiliki dimensi kolektif yang dapat dimobilisasi untuk memperjuangkan

kepentingan politik tertentu. Menurut Castells (2011) politik identitas muncul ketika sekelompok masyarakat yang memiliki identitas kultural atau sosial tertentu berusaha menegaskan eksistensi dan hak-haknya di ruang publik. Identitas dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai “siapa kita”, tetapi juga sebagai “pembeda” dari kelompok lain.

Politik identitas pada dasarnya dapat dimaknai sebagai suatu tindakan individu atau kelompok dalam politik yang mengutamakan perebutan kekuasaan dengan landasan kesamaan identitas (Rif'an, 2020). Identitas yang dimaksud dapat merujuk pada kategori sosial seperti ras, etnisitas, agama, maupun gender. Dalam kerangka ini, kesamaan identitas berfungsi sebagai sumber legitimasi dan solidaritas yang dimanfaatkan untuk membangun konsolidasi politik.

Dalam konteks kontestasi elektoral, identitas seringkali digunakan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kohesi kelompok dan memperluas basis dukungan. Dengan menekankan kesamaan latar belakang sosial atau kultural, aktor politik berupaya menciptakan rasa kebersamaan yang mampu mendorong loyalitas politik di antara anggota kelompok tersebut (Wingarta et al., 2021). Strategi ini dapat memperkuat afiliasi politik berbasis identitas sekaligus memengaruhi preferensi memilih dalam menentukan pilihan elektoral. Namun demikian, politik identitas tidak selalu bersifat homogen atau eksklusif. Dalam beberapa konteks, identitas dapat dinegosiasikan dan dipadukan dengan faktor programatik maupun pertimbangan rasional lainnya. Oleh karena itu,

analisis politik identitas dalam pemilihan umum perlu mempertimbangkan interaksi antara faktor identitas dan variabel sosial-politik lainnya yang memengaruhi perilaku memilih (Wingarta et al., 2021).

Menurut Suswanta (2018) sejumlah akademisi dan politisi Indonesia sedang berdebat keras tentang penggunaan politik identitas dalam konteks politik nasional. Ada yang mendukung politik identitas dan ada yang menentangnya. Mereka cenderung melihat politik identitas sebagai cara yang sah untuk memperjuangkan kepentingan dan keinginan kelompok tertentu (Samosir & Novitasari, 2022). Menurutnya, politik identitas membantu kelompok bersatu, memberikan suara kepada mereka yang terpinggirkan, dan mendukung hak identitas yang penting. Pengakuan identitas individu atau kelompok sangat penting untuk memastikan keadilan dan inklusivitas dalam politik, terutama di negara-negara yang kaya akan keragaman budaya dan agama seperti Indonesia (Prasetyo et al., 2023)

Di samping dipandang sebagai strategi mobilisasi politik, politik identitas juga menuai kritik dari sejumlah kalangan. Kritik tersebut umumnya berangkat dari kekhawatiran bahwa penggunaan identitas sebagai basis konsolidasi politik berpotensi mengganggu kohesi sosial dan memperdalam fragmentasi masyarakat. Politik identitas dinilai dapat memperkuat garis pemisah antar kelompok sosial sehingga memicu polarisasi dalam ruang publik.

Sebagian pandangan kritis menyatakan bahwa praktik politik identitas seringkali dimanfaatkan secara instrumental untuk kepentingan politik jangka pendek, seperti mempertahankan kekuasaan atau melemahkan lawan politik. Dalam konteks ini, identitas tidak lagi berfungsi sebagai representasi aspirasi kelompok, melainkan sebagai alat mobilisasi yang dapat menimbulkan eksklusi sosial dan ketegangan antar kelompok (Renhoard & others, 2019). Situasi tersebut berpotensi menggeser perhatian publik dari isu-isu substantif seperti pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan menuju pertarungan simbolik berbasis identitas.

Kekhawatiran terhadap dampak politik identitas semakin menguat ketika penggunaannya memicu polarisasi politik yang tajam dalam masyarakat. Polarisasi tersebut tidak hanya berdampak pada dinamika elektoral, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas sosial dalam jangka panjang. Oleh karena itu, analisis politik identitas dalam konteks demokrasi Indonesia perlu mempertimbangkan baik potensi mobilisasi solidaritas maupun risiko fragmentasi sosial yang mungkin ditimbulkannya.

Dalam konteks Indonesia, politik identitas kerap muncul dalam kontestasi elektoral, baik di tingkat nasional maupun lokal. Agama, etnis, dan gender seringkali menjadi faktor signifikan yang memengaruhi preferensi pemilih (Mujani et al., 2018). Penelitian Aspinall & Berenschot (2019) menunjukkan bahwa politik elektoral di Indonesia banyak diwarnai

oleh praktik mobilisasi identitas, baik oleh partai politik maupun kandidat. Isu agama, misalnya, terbukti menjadi salah satu faktor dominan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, ketika perbedaan identitas agama kandidat digunakan sebagai strategi kampanye untuk memobilisasi dukungan. Fenomena serupa juga terlihat di berbagai daerah lain, di mana kandidat dari minoritas agama atau etnis menghadapi tantangan besar untuk memenangkan pemilu. Namun, politik identitas tidak selalu bersifat eksklusif atau diskriminatif. Dalam beberapa kasus, pemilih justru memilih kandidat minoritas karena melihatnya sebagai simbol keberagaman dan inklusivitas, serta bentuk resistensi terhadap dominasi mayoritas.

1.6.3.1 Politik Identitas, Triple Minoritas, dan Pilihan Pemilih

Dalam kasus Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2024, isu politik identitas menjadi sangat relevan untuk di. Agustina Wilujeng Pramestuti tidak hanya berhadapan dengan satu bentuk identitas minoritas, melainkan tiga sekaligus (*triple minoritas*): sebagai perempuan dalam budaya politik patriarki, sebagai penganut Katolik di tengah mayoritas Muslim, dan sebagai etnis non-Jawa di wilayah Jawa. Identitas berlapis ini seharusnya menjadi hambatan signifikan bagi peluang elektoralnya.

Namun kenyataannya, Agustina justru berhasil memenangkan pilkada dengan perolehan suara mayoritas. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian pemilih di Semarang tidak hanya mempertimbangkan identitas mayoritas-minoritas secara sempit, tetapi juga melihat aspek lain seperti

kapabilitas personal, kedekatan emosional, afiliasi partai, serta program kerja yang ditawarkan. Dalam hal ini, politik identitas berfungsi ganda: di satu sisi menghadirkan hambatan (stigma, stereotip, prasangka), namun di sisi lain justru dapat menjadi modal simbolik ketika memilih memaknai kandidat minoritas sebagai representasi dari keberagaman, keterbukaan, dan perubahan sosial.

Dengan demikian, teori politik identitas dapat digunakan untuk membaca dinamika pilihan memilih dalam Pilwalkot Semarang 2024. Identitas triple minoritas Agustina berperan sebagai variabel penting dalam membentuk persepsi pemilih, baik secara positif maupun negatif. Analisis berbasis politik identitas memungkinkan penelitian ini memahami mengapa sebagian pemilih justru melampaui batas-batas identitas tradisional (agama mayoritas, etnis mayoritas, dan gender dominan), dan memilih kandidat minoritas.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Perilaku memilih menurut Kristiadi adalah pemberian suara kepada partai dan/atau kandidat dalam suatu Pemilihan yang didorong karena keterikatan pada beberapa faktor seperti faktor sosiologis, faktor psikologis dan faktor pilihan rasional (Sentosa & Karya, 2022). Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan untuk menganalisis perilaku memilih adalah melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis, psikologis dan pilihan rasional. Ketiga pendekatan tersebut digunakan sebagai dasar teori utama dalam melihat perilaku memilih dalam Pemilihan Walikota Semarang tahun 2024.

Tabel 1.3 Operasionalisasi Konsep Variable Penelitian

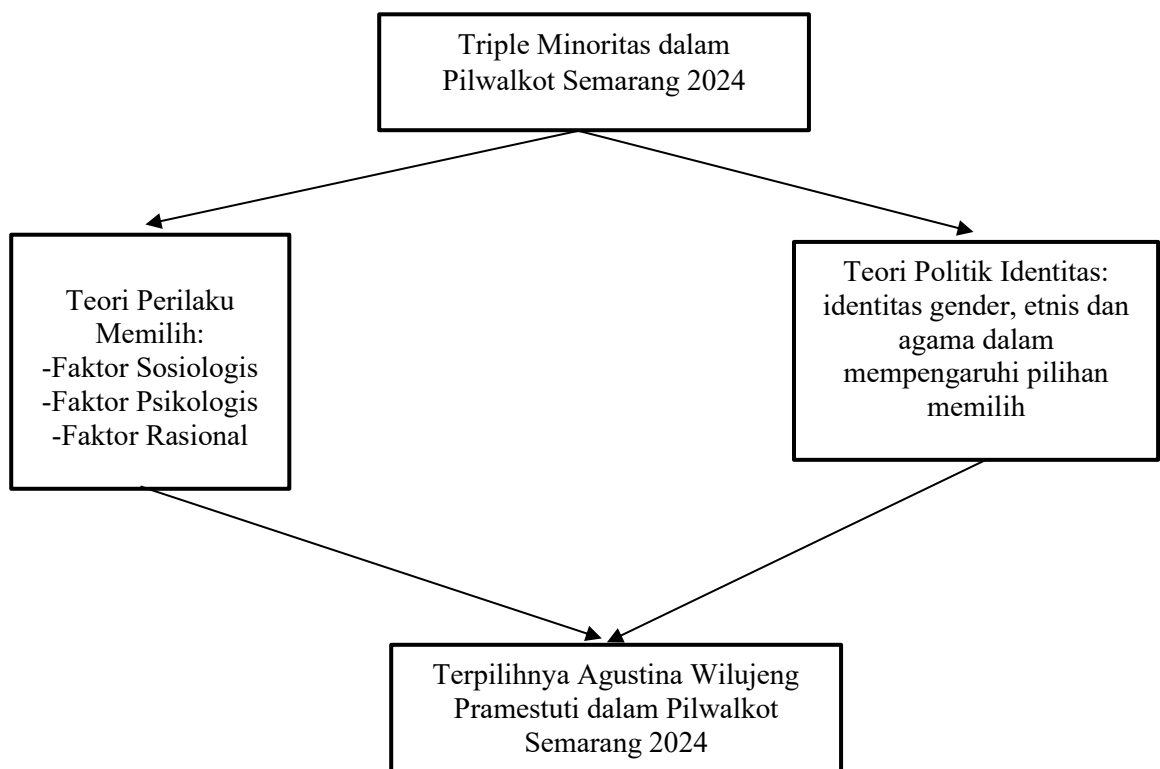
No	Konsep teori	Indikator	Keterangan
1	Perilaku memilih (<i>Votter Behavior</i>) a.Faktor Sosiologis b.Faktor Psikologis c. Faktor Rasional	- Agama pemilih sebagai pertimbangan pemilih - Etnis pemilih - Gender pemilih - Kelas sosial/pendidikan - Identifikasi partai politik (PDIP vs koalisi lain). - Orientasi terhadap kandidat (sikap kandidat). - Oerientasi isu atau tema (program kerja kandidat). - Penilaian program kerja. - Rekam jejak kandidat. - Harapan akan adanya perbaikan layanan publik.	Teori perilaku memilih digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pilihan pemilih, baik dari aspek sosiologis (agama, etnis, gender), psikologis (identifikasi partai, persepsi kandidat), maupun rasional (program, rekam jejak, dan harapan).

2	Politik identitas	- Pemilih terpengaruh isu agama dalam kampanye. - Pemilih terpengaruh isu etnis dalam kampanye. - Pemilih memilih justru karena simbol keberagaman dan inklusivitas	Menjelaskan bagaimana identitas sosial (agama, etnis, gender) berfungsi sebagai sumber mobilisasi sekaligus resistensi politik. Dalam kasus Agustina, identitas triple minoritas bisa dipandang sebagai hambatan, tetapi juga dimaknai positif oleh sebagian pemilih sebagai simbol keberagaman dan inklusivitas.
---	-------------------	---	---

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan literatur dan teori yang digunakan.

1.8 Kerangka Berpikir

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran



1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Creswell penelitian kualitatif adalah pendekatan atau penelusuran untuk menemukan dan memahami gejala utama melalui wawancara dengan peserta penelitian dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan luas, setelah itu data dikumpulkan, dianalisis, dan ditafsirkan lebih dalam. (Creswell, 2016). Dalam penelitian kualitatif, banyak melibatkan peneliti untuk menyelami settingan dari penelitian dikarenakan para peneliti kualitatif perlu untuk menjelaskan sejumlah prosedur penelitian untuk menunjukkan hasil penelitian benar-benar konsisten dan reliabel.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (case study) sebagai strategi utama dalam menjawab pertanyaan penelitian. Pendekatan studi kasus dipilih karena sesuai untuk menjelaskan fenomena yang diawali dengan pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa”, terutama ketika peneliti memiliki keterbatasan dalam mengendalikan peristiwa yang diteliti serta ketika fokus kajian berada pada fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2014).

Menurut Yin (2014), studi kasus merupakan strategi penelitian yang memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap suatu kasus tertentu dalam batasan konteks yang jelas. Pendekatan ini memberikan ruang untuk memahami dinamika dan kompleksitas suatu fenomena secara komprehensif, sehingga makna yang

terkandung dalam kasus yang diteliti dapat dianalisis secara rinci dan kontekstual. Dengan demikian, penggunaan studi kasus dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali secara mendalam dinamika perilaku memilih dalam konteks Pemilihan Wali Kota Semarang Tahun 2024, khususnya dalam merespons kandidat yang dikategorikan sebagai triple minoritas.

1.9.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif, sumber peneliti dilakukan dengan cara turun langsung untuk melakukan pengamatan, *face to face interview* dan dokumentasi dengan Agustina Wilujeng Pramestuti, ketua Tim Pemenangan, Anggota PDIP Kota Semarang dan pemilih dari berbagai latar belakang.

1.9.3 Fenomena Penelitian

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia merupakan arena politik yang sarat dengan dinamika identitas, di mana faktor agama, etnis, dan gender kerap memengaruhi preferensi memilih. Dalam banyak kasus, kandidat dari kelompok minoritas sering menghadapi hambatan struktural, kultural, dan simbolik, mulai dari bias dalam proses rekrutmen politik, keterbatasan akses terhadap sumber daya kampanye, hingga prasangka yang hidup di tengah masyarakat. Literatur politik elektoral di Indonesia menunjukkan bahwa kemenangan kandidat minoritas masih merupakan fenomena langka, terlebih di daerah dengan komposisi demografis yang mayoritasnya homogen baik dari segi agama maupun etnis (Mujani, 2020).

Kota Semarang, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, memiliki karakteristik demografis yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan berasal dari etnis Jawa. Secara historis, konfigurasi ini cenderung menguntungkan kandidat yang memiliki kesamaan identitas mayoritas dengan pemilih. Namun, pada Pilkada 2024, terjadi fenomena politik yang menarik perhatian publik dan pengamat politik, yakni kemenangan Agustina Wilujeng Pramestuti seorang perempuan, beragama Katolik, dan bukan berasal dari etnis mayoritas Jawa murni dalam kontestasi Pemilihan Wali Kota Semarang. Posisi Agustina sebagai “triple minoritas” menempatkannya pada titik yang secara teoritis rentan terhadap resistensi elektoral, tetapi realitas di lapangan menunjukkan hasil yang berlawanan dengan prediksi tersebut.

Fenomena kemenangan ini menjadi unik karena bertentangan dengan tren umum politik elektoral di Indonesia, di mana kandidat dari kelompok minoritas cenderung memiliki peluang lebih kecil untuk menang tanpa dukungan politik yang sangat kuat, baik dari partai besar, tokoh lokal berpengaruh, maupun jejaring politik dan sosial yang luas. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada dinamika memilih dalam Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2024. Lebih jauh, fenomena ini penting untuk dikaji karena memberikan kontribusi pada wacana demokrasi inklusif di Indonesia. Kemenangan kandidat triple minoritas di daerah dengan demografi mayoritas yang homogen dapat menjadi indikasi adanya pergeseran perilaku memilih, penguatan rasionalitas politik, atau

keberhasilan strategi kampanye yang efektif. Analisis terhadap fenomena ini akan membantu memperkaya literatur mengenai politik identitas, strategi kampanye, dan modal politik dalam konteks Pilkada langsung di Indonesia.

1.9.4 Jenis dan Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama tentang permasalahan yang diungkapkan. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya dengan cara pengumpulan data secara langsung di lapangan. Data ini biasanya diperoleh melalui metode penelitian seperti eksperimen, wawancara langsung, dan observasi (Indriantoro & Supomo, 2018). Pengambilan data primer ini dilakukan dengan informan untuk menggali mengenai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara dengan subjek penelitian di Kota Semarang.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada dan telah dikumpulkan serta diolah oleh pihak lain. Data ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti laporan, buku, jurnal, internet, atau dokumen resmi yang relevan dengan penelitian (Sugiyono, 2017). Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua, ketiga dan selanjutnya. Data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dapat berbentuk buku, jurnal, artikel, dokumen atau arsip

1.9.5 Instrumen Penelitian

Teknik Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga instrument dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat bantu seperti dokumen, notebook, handphone yang digunakan untuk mengumpulkan data.

1.9.6 Pemilihan Informan

Dalam penelitian ini, teknik Pemilihan informan menggunakan pendekatan purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan secara sengaja dengan mempertimbangkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti akan memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan atau pengalaman yang mendalam mengenai topik yang diteliti, sehingga informasi yang diberikan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman masalah.

Teknik purposive sampling memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang kaya dan mendalam dari subjek yang benar-benar memahami konteks dan substansi permasalahan. Purposive sampling digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memilih informan yang memiliki kapasitas dalam menjawab pertanyaan penelitian secara substansial. Teknik ini dinilai sesuai dalam studi kasus, karena memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk mengakses narasumber yang relevan dan kredibel.

Tabel 1.4 Informan penelitian

No	Nama Informan	Kriteria Pemilihan	Atribusi
1.	Kadar Lusman, SE, MM	Terlibat langsung dalam manajemen kampanye dan memiliki akses informasi strategi lapangan	Ketua DPRD Kota Semarang Tahun 2024-2029
2.	Rahmulyo Adi Wibowo, S.H., M.H	Terlibat langsung dalam manajemen kampanye dan memiliki akses informasi strategi lapangan	Anggota DPRD Kota Semarang Tahun 2024-2029
3.	Untung Sujarno	Terlibat langsung dalam manajemen kampanye dan memiliki akses informasi strategi lapangan	Kepala Kantor Sekretariat DPC PDIP Kota Semarang
4.	H. Sriyono, S.Pd	Mempunyai pengaruh di komunitas dan pandangan terhadap penerimaan kandidat minoritas	Tokoh Masyarakat/Agama (Tokoh agama mayoritas Islam)
5.	Supriyono	Mempunyai pengaruh di komunitas dan pandangan terhadap penerimaan kandidat minoritas	Tokoh Masyarakat/Agama (Tokoh agama mayoritas Islam)
6.	Adhitya Sandy W	Memberikan alasan memilih/ tidak memilih Agustina	Pemilih dari kelompok mayoritas
7.	Margaret Ivana	Memberikan alasan memilih/ tidak memilih Agustina	Pemilih dari kelompok minoritas
8.	Dikha	Memberikan alasan memilih/ tidak memilih Agustina	Pemilih dari kelompok mayoritas

9.	Muhammad Farhan	Memberikan alasan memilih/ tidak memilih Agustina	Pemilih dari kelompok mayoritas
10.	Abri Dealdi Pratama	Memberikan alasan memilih/ tidak memilih Agustina	Pemilih dari kelompok minoritas
11.	Eko Nurdianto	Memberikan alasan memilih/ tidak memilih Agustina	Pemilih dari kelompok mayoritas
12.	Susilo	Memberikan alasan memilih/ tidak memilih Agustina	Pemilih dari kelompok mayoritas
13.	Liana	Memberikan alasan memilih/ tidak memilih Agustina	Pemilih dari kelompok mayoritas
14.	Nasyilla	Memberikan alasan memilih/ tidak memilih Agustina	Pemilih dari kelompok mayoritas
15.	Dwi Ariyanto	Memberikan alasan memilih/ tidak memilih Agustina	Pemilih dari kelompok mayoritas
16.	Najma Aufira	Memberikan alasan memilih/ tidak memilih Agustina	Pemilih dari kelompok mayoritas
17.	Feriansyah	Memberikan alasan memilih/ tidak memilih Agustina	Pemilih dari kelompok mayoritas
18.	Moh Sholeh	Memberikan alasan memilih/ tidak memilih Agustina	Pemilih dari kelompok mayoritas
19.	Nida Husna	Memberikan alasan memilih/ tidak memilih Agustina	Pemilih dari kelompok mayoritas
20.	Ardian Angga	Memberikan alasan memilih/ tidak memilih Agustina	Pemilih dari kelompok mayoritas
21.	Nailah Dewi Khalisah	Memberikan alasan memilih/ tidak memilih Agustina	Pemilih dari kelompok mayoritas
22.	Agus Susanto	Memberikan alasan memilih/ tidak memilih Agustina	Pemilih dari kelompok mayoritas
23.	Ellyana	Memberikan alasan memilih/ tidak memilih Agustina	Pemilih dari kelompok minoritas

24.	Diana Nirwani	Memberikan alasan memilih/ tidak memilih Agustina	Pemilih dari kelompok mayoritas
25.	Diki	Memberikan alasan memilih/ tidak memilih Agustina	Pemilih dari kelompok mayoritas
26.	Furia Herawati	Memberikan alasan memilih/ tidak memilih Agustina	Pemilih dari kelompok mayoritas
27.	Suharti	Memberikan alasan tidak memilih Agustina	Pemilih dari kelompok mayoritas

Sumber: diolah oleh peneliti

1.9.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan krusial dalam proses penelitian karena menentukan kualitas dan kedalaman informasi yang diperoleh. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik yang relevan dengan pendekatan studi kasus, guna memperoleh data yang akurat dan komprehensif.

Menurut Creswell (2012), dalam penelitian studi kasus, prosedur pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai sumber, antara lain observasi, wawancara, dokumentasi, serta materi audiovisual. Keberagaman teknik tersebut memungkinkan peneliti untuk melakukan triangulasi data sehingga meningkatkan validitas dan kedalaman analisis. Dengan memanfaatkan berbagai sumber data, peneliti dapat memahami fenomena yang diteliti secara lebih menyeluruh dalam konteks kehidupan nyata. Dalam penelitian ini, teknik-teknik tersebut digunakan untuk menggali dinamika perilaku memilih secara mendalam, khususnya dalam memahami bagaimana responden memaknai keberadaan kandidat triple minoritas dalam Pilwakot Semarang 2024.

Langkah yang paling penting dalam melakukan penelitian adalah teknik pengumpulan data, sebab tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Seandainya peneliti tidak memahami cara pengumpulan data dengan baik, maka mereka tidak akan mendapatkan data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Demi memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, proses pengumpulan data pun dilakukan. Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti:

1. Wawancara

Menurut Moleong (2017) wawancara merupakan sebuah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan tujuan tertentu. Pewawancara yang bertanya dan terwawancara yang menjawab pertanyaan yang diajukan. Dengan begitu, peneliti akan menyusun pedoman wawancara untuk mencatat hasil wawancara setelah proses wawancara selesai.

Teknik wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer dari sejumlah informan penelitian. Wawancara dilakukan secara formal dan informal agar peneliti dapat memperoleh data sedalam mungkin dengan harapan data tersebut dapat digunakan untuk mengetahui permasalahan yang mendasar dalam objek penelitian. Dalam hal ini, diperlukan daftar pertanyaan dan improvisasi dalam pengajuan pertanyaan. Inti dari pertanyaan tersebut dapat dikembangkan saat melakukan wawancara dengan informan penelitian.

2. Dokumentasi

Menurut Abubakar (2021) dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui penganalisisan sumber-sumber tertulis maupun tidak tertulis yang memuat data dan informasi yang diperlukan peneliti dalam kegiatan penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan meninjau, menganalisis, dan memanfaatkan dokumen-dokumen yang relevan sebagai sumber informasi untuk mengumpulkan data.

1.9.8 Teknik Analisis Data

Menurut Creswell (2012) analisis data adalah proses yang sistematis untuk mengorganisasikan, menginterpretasikan, dan menyajikan data yang telah dikumpulkan selama penelitian.. Proses ini dilakukan dengan mengorganisasi data ke dalam kategori, menguraikan ke dalam unit-unit, mengekstraksi informasi, menyusun dalam pola, dan memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Pada penelitian ini model analisis yang digunakan peneliti yaitu model yang dikemukakan oleh (Miles et al., 2014), yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan dari teknik analisis data yang dilakukan dengan memilah, menyederhanakan, serta memfokuskan data yang diperoleh di lapangan pada hal-hal yang penting. Reduksi data berguna untuk menyederhanakan serta mentransformasikan data

kualitatif ke dalam berbagai catatan melalui seleksi yang ketat. Reduksi data sama dengan merangkum, memilih hal-hal penting dan mencari tema serta pola. Setelah reaksi selesai, maka akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan dan mengajukan permohonan kembali jika diperlukan.

2. Display Data (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data merupakan tahap penting setelah proses reduksi data dilakukan. Data yang telah dikategorikan dan dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk yang sistematis agar memudahkan peneliti dalam memahami pola, hubungan, serta makna yang terkandung di dalamnya. Penyajian data dapat dilakukan melalui uraian naratif, tabel, diagram, bagan alur (*flowchart*), maupun pemetaan hubungan antar kategori.

Melalui penyajian data yang terstruktur, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika fenomena yang diteliti. Tahap ini juga membantu dalam proses penarikan kesimpulan serta perencanaan langkah analisis selanjutnya berdasarkan pemahaman yang telah dibangun dari data lapangan. Dengan demikian, penyajian data tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pelaporan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperdalam interpretasi terhadap temuan penelitian.

3. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi).

Tahap akhir dalam proses analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dihasilkan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses reduksi dan penyajian data yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, setiap kesimpulan harus didasarkan pada temuan empiris yang valid serta didukung oleh bukti-bukti yang konsisten dari data lapangan.

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan bersifat tentatif dan dapat berkembang seiring dengan bertambahnya data serta pendalaman analisis. Hal ini disebabkan karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif pada dasarnya bersifat fleksibel dan dapat mengalami penyesuaian setelah peneliti berinteraksi langsung dengan realitas di lapangan. Dengan demikian, proses verifikasi menjadi penting untuk memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan fenomena yang diteliti secara akurat dan kontekstual.